



# CASCADING

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
JL. GOR MUSTIKA NO. 8 BLORA TELP./FAX. (0296)533191

## **PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dapat menyusun Cascading Tahun 2019, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yg bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara Subtanstif Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2019 merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta

pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi, visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Clean Government dan Good Governance.

Demikian Cascading ini dibuat dengan harapan akan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan guna mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan, Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Blora, 2019  
KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA

**HARIYANTO, S.IP., M.Si**  
NIP. 19631017 198603 1 001



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang ... .....	1
1.2 Gambaran Kondisi Organisasi .....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	5
1.4 Ruang Lingkup .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis .....	10
2.2 Visi dan Misi .....	11
2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....	14
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum .....	14
2.5 Cascading Kinerja .....	18
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 LATAR BELAKANG

Good governance (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah : profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “*good governance*” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah (1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.2 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Dalam Rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan.

Sumber daya manusia berdasarkan data awal tahun 2019 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, jumlah personil Aparatur Sipil Negeranya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 26 orang dan tenaga non PNS/kontrak sebanyak 13 orang berdasar klasifikasi kepangkatan dapat dilihat pada table dan grafik berikut :



Tabel 1.1  
 Jumlah Aparatur Sipil Negara  
 menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)				Non PNS
		IV	III	II	I	
1	Kepala SKPD	1				
2	Sekretaris	1				
3	Ka. Sub Bag Program dan Keuangan		1			
4	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian					
5	Ka. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		1			
6	Ka. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		1			
7	Ka. Seksi Pemberdayaan SDA dan TTG		1			
	Ka. Seksi		1			
8	Ka. Bidang Pengembangan Desa		1			
9	Ka. Sasi Sarana Prasarana Desa dan Kelurahan		1			
10	Ka. Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan		1			
			1			
11	Ka. Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosbud	1				
12	Ka. Seksi Kelembagaan Masyarakat		1			
13	Ka. Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosbud	1				
	Ka. Seksi		1			
24	Staf		7	3		13
	Jumlah	4	18	3		13

Tabel 2.2  
Jumlah SDM Non PNS

NO	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Sekretariat	7 Orang
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3 Orang
3	Bidang Pengembangan Desa	2 orang
4	Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosbud	1 orang
	Jumlah	13 Orang

Sumber Data Awal Tahun 2019

Grafik 2.1



Sumber data Tahun 2017

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, menegaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dipimpin oleh Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengembangan Desa, Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

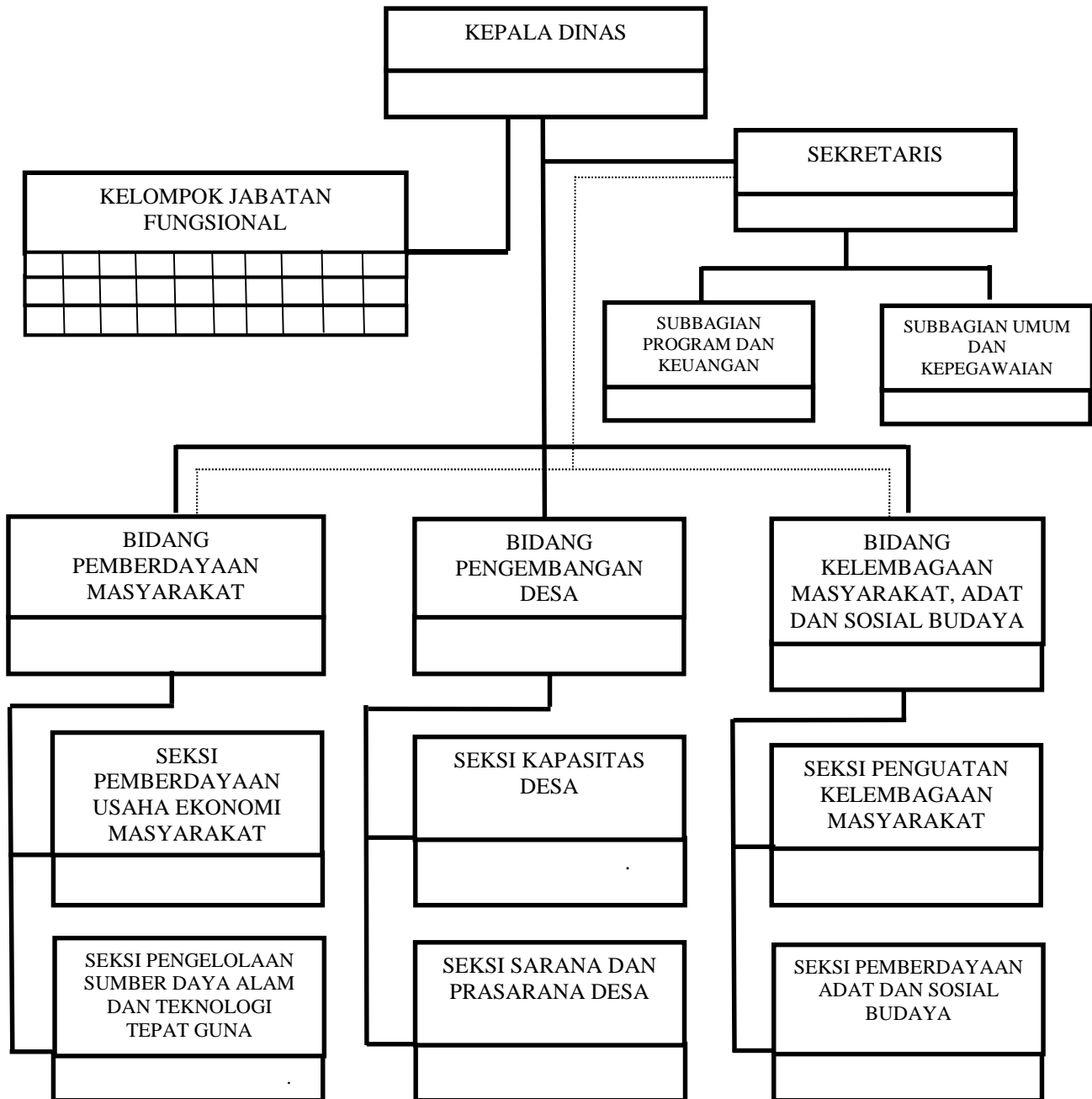
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA



Sumber : Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2016

Keterangan :

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
  1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
  2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
  3. Seksi perencanaan dan keuangan desa.
- d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
  1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
  2. Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa; dan
  3. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
- e. Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, membawahi :
  1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
  2. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Sosial Budaya; dan
  3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
  1. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sampai saat ini belum ada.

## 1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2018 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora tahun 2018.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemberdaan Masyarakat dan Desa tercantum didalam RPJMD serta RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### BAB I Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

#### 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi

#### 1.3 Struktur Organisasi

#### 1.4 Ruang Lingkup

### BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

#### 2.1 Rencana Strategis

#### 2.2 Visi dan Misi

#### 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

#### 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

#### 2.5 Cascading Kinerja

### BAB III Penutup

### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS (2016-2021).

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKjIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2016, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 tersebut, adalah sebagai berikut :

## 2.2 VISI DAN MISI.

Berdasarkan arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kapasitas aparatur desa, dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Blora di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”.

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di

berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih periode tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2016 - 2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mengemban misi No 4, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal”.

Misi tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan yaitu percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan keuangan. Selain itu juga melaksanakan program prioritas sebagai berikut :

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4. Program peningkatan peran perempuan dipedesaan;
5. Program pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya.

Masih ada 1 (satu) program lagi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana kegiatannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dana pendampingnya yaitu :

1. Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta dana pendampingnya.

### 2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas ditetapkanlah Tujuan Strategis (TS) *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora* sebagai berikut :

“Meningkatkan Pemberdayaan dan pembangunan di desa”

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu :

“Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan”.

### 2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihanstrategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Blora, strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan

mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan.

#### 2.4.1 Strategi

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora terdiri dari :

##### 1. Kebijakan Strategi

- 1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, Pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa;
- 2) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
- 3) Memantapkan sistem pendataan profil desa sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah;
- 4) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
- 5) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat.
- 6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan kinerja serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa.
- 7) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.

##### 2. Program Strategi

- 1) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- 2) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- 4) Peningkatan peran perempuan dipedesaan;

5) Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya.

#### 2.4.2 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan Umum Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa, dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tertuang dalam Tabel berikut ini :

Tabel  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora  
 Tahun 2017-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Misi No. 4 :	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local.		
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, kegiatan TTG dan Posyantek (Jumlah Posyantek Aktif)
			Jumlah Desa Berdikari
			Terlaksananya kegiatan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan dengan baik
	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;	Terlaksananya penetapan RPJMDes, musrenbangdes, RKPDes dan APBDDes tepat waktu
			Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen badan

pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan		usaha milik desa dan terbentuknya BUMDes baik BUMDes Mandiri dan BUMDes Bersama
	Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Terlaksananya pelatihan ketrampilan/usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif perempuan dipedesaan
		Terlaksananya pembinaan posyandu
	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa
	Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya	Terlaksananya kegiatan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa serta kegiatan BBGRM
Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur
		Jumlah tenaga kerja desa yang terserap



## 2.5 CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV.

Adapun Rincian Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Kesimpulan dari Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 adalah bahwa penyusunan cascading kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon yg ada dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yg ditetapkan.

Demikianlah Cascading Kinerja ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat, kritikan dan saran yg disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

Blora,

2019

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA

HARIYANTO, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631017 198603 1 001

**CASCADING**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA**

**VISI :** Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat



**MISI :** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal



**TUJUAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..							
				2016		2017		2018		2019	2020
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa	Jumlah desa berdikari	Desa	5	5	7	5	10	5	15	20
		Persentase swakelola dana desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan	Kelompok	0	0	8	6	8	6	5	2
		Jumlah BUMDes yang aktif	Kelompok	0	0	15	18	20	22	42	45
		Persentase Posyantek yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100







4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DIPEDESAAN	Prosentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	0	6	70	8	75	75	80	85
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA	Prosentase kategori desa	%	100	92	100	92	100	100	100	100
6	PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100



#### KEGIATAN

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..							
				2016		2017		2018		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang diberdayakan	Lembaga/ organisasi			28		28		28	28
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KPSPAM desa	orang			120 orang		120 orang		127 orang	127 Orang
		Jumlah peserta pelatihan MIS bagi desa pamsimas	orang			30 orang		30 orang		30 orang	30 orang
	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan PIN yang diikuti	Kali			1		2		3	4

	Sosialisasi teknologi tepat guna dan Posyantek	Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar desa	orang			60 orang		120 Orang		180 orang	240 orang
	Penguatan pos Pelayanan Teknologi	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi penguatan posyantekdes	orang			60 orang		120 orang		180 orang	240 orang
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Kab.)	desa	0	0	0	0	0	0	12 desa	15 desa
		Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD	desa	0	0	0	0	0	0	12 desa	15 desa
	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan, DD, ADD, BHPR	desa			271 desa		271 desa		271 desa	271 desa
	Pendampingan KPMD	Jumlah desa yang didampingi	desa			271 desa		271 desa		271 desa	271 desa
	Rintisan desa berdikari	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari	desa			5 desa		7 desa		10 desa	15 desa
	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Desa	Persentase terpenuhi informasi yang akurat dan mudah di desa	%	0	0	0	0	0	0	0	100%
	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	kelompok			64		105		145	190
	Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama	Jumlah BUMDes Bersama yang mengikuti pelatihan	kelompok	0		6		6		6	15
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Kab.)	desa	6		9		0		0	0
		Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Prov.)	desa	3	3	6	3	9	3	0	0







Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya	Jumlah desa adat yang mendapatkan pembinaan	desa	16	16	16	16	16	16	16	16
Inventarisasi Kekayaan Desa	Jumlah <i>Updating</i> data inventarisasi kekayaan desa	buku	0	0	0	0	0	0	0	1
Pengelolaan Kekayaan Desa	Prosentase penyelesaian penataan asset dan kekayaan desa dengan baik dan benar	%	0	0	0	0	0	0	0	100
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Bimtek SID	desa								
TMMD (Bankeu Prov.)	Jumlah Desa yang mendapatkan Bankeu TMMD Prov.)	desa	3	3	3	3	3	3	3	3

Blora, Juni 2019

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Blora

HARIYANTO, S.IP.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19631017 198603 1 011

2021
Target
14
25
100
2
47
100

2021
15
1
85
80
90
90
100
100
100

100
6.775

2021
13
1
85
80
90
100

100
90
100
100

2021
13
28
127 orang
30 orang
5

300 orang
300 orang
18 desa
18 desa
271 desa
271 desa
20 desa
100%
235
25
0
0

0
0
0
0
845
287
558
3
6
271



271
271
271
1
271
90
100
330
295

16
1
100
3

**CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021**

**TUJUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Definisi :  
Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

Catatan:

Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

TUJUAN SKPD ( ULTIMATE OUTCOME)			
meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa			
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal Tahun 1	Kondisi Tahun ke 5
Jumlah desa berdaya	Desa	5	25
Persentase swakelola dana desa	%	0	100
Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan	Kelompok	0	9
Jumlah BUMDes yang aktif	Kelompok	0	47
Persentase posyantek yang aktif	%	0	100

**SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Definisi :  
Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

Catatan:

Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

SASARAN STRATEGIS (INTERMEDIATE OUTCOME)									
Sasaran OPD 1 (Eselon II) : Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pedesaan									
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
Jumlah Posyantek Aktif	Jumlah Posyantek aktif	unit	1	1	1	1	1	1	1
Persentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR, dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik			75,00	75,00	80,00	80,00	85,00		
Persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDDes dan APBDes tepat waktu			60	65	70	75	80		

**PROGRAM**

Definisi :  
Upaya besar ( gabungan beberapa kegiatan ) yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD). **Sasaran program dan sasaran SKPD tidak boleh sama**

Mediate Outcome									
Nama Program 1 (Eselon III): Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
	Jumlah Posyantek Aktif	Jumlah Posyantek yang terbentuk di Kabupaten Blora	Unit	1	2	1	1	1	1

**KEGIATAN**

Definisi :  
Upaya konkrit (kegiatan) yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program  
Kalimat kegiatan tidak boleh diawali dengan kata : Peningkatan, Pengembangan, namun dapat diawali dengan Penyelenggaraan, Pelaksanaan, dan

Output							
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang diberdayakan	Terlaksananya pembinaan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Lembaga/Organisasi	28	28	28	28	28

Output							
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KP-SPAMS Desa	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	orang	120	120	127	127	127

Output							
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan HIR yang diikuti	Terlaksananya keterlibatan gelar TTG Nasional dan PIN Deskel	Kali	1	2	3	4	5

Output							
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar Desa	Meningkatnya pemahaman dan kegunaan Posyantek antar desa	orang	60	120	180	240	300

Output							
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penguatan Pos Pelayanan Teknologi							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitas penguatan posyantekdes	Meningkatkan pemahaman dan kegunaan Posyantekdes	orang	60	120	180	240	300

Output							
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah Desa yang menerima kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan III	Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan III	Desa	6	9	12	15	18

Output							
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemberian stimulan pembangunan desa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah Desa yang menerima bantuan keuangan, DD, ADD, dan BHPR	Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan, DD, ADD, dan BHPR	Desa	271	271	271	271	271

Mediate Outcome									
Nama Program 1 (Eselon III): Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
	Persentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR, dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik		%	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	

Mediate Outcome									
Nama Program 1 (Eselon III): Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
	Persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDDes dan APBDes tepat waktu		%	60	65	70	75	80	

PKK : UP2K ,  
Perempuan :  
Pelatihan2

Sasaran OPD 2 (Eselon II)		Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dipedesaan						
		TARGET						
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
Presentase jumlah BUMDes yang diperdaskan		%	30	60	75	85	90	
Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	kelompok	70	75	80	85	90	
Presentase posyandu skini		%	100	100	100	100	100	
Presentase kategori desa		%	100	100	100	100	100	
Presentase aparaturn pemerintah desa yang telah dilatih		%	100	100	100	100	100	

Mediate Outcome										
Nama Program 2 (Eselon III): Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan										
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
	Jumlah BUMDes	Jumlah BUMDes yang telah terbentuk	Kelompok/ Unit	7	10	15	20	25		
				70*	111*	155*	205*	280*		

Keterangan : \* target baru

Mediate Outcome										
Nama Program 3 (Eselon III): Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa										
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
	Presentase aparaturn pemerintah desa yang telah dilatih		%	100	100	100	100	100		

Mediate Outcome										
Nama Program 4 (Eselon III): Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan										
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5		
	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih		kelompok	70	75	80	85	90		

Output							
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pendampingan KPMD							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah Desa yang ditampangi	terlaksananya pendampingan KPMD	Desa	271	271	271	271	271

Output							
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Rintisan Desa Berdikari							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah Desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari	terwujudnya desa berdikari	Desa	5	7	10	15	20

Output							
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terbentuknya kelompok BUMDes yang ada di desa	Kelompok/ Unit	64	105	145	190	235

Output							
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Fasilitas Pembentukan BUMDes Bersama							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah BUMDes Bersama yang mengikuti pelatihan	Terbentuknya BUMDes Bersama antar desa	Desa	0	6	6	15	25

Output							
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Terlaksananya pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	orang	813	813	813	813	813

Output							
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	orang	271	271	271	271	271

Output							
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terlaksananya pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	orang	542	542	542	542	542

Output							
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Terlaksananya pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	kelompok	70	75	80	85	90

Output							
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
		SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Presentase PKK (Kab., Kec., Desa) yang mendapatkan pembinaan	Terlaksananya pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	%	100	100	100	100	100

Sasaran OPD 3 Peningkatan kualitas infrastruktur desa (Eselon II) :							
		TARGET					
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur		%	100	100	100	100	100
Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	orang			6775	6775	6775

Mediate Outcome								
Nama Program 4 (Eselon III): Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan								
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
	Prosentase Posyandu aktif	Terlaksananya pembinaan posyandu	%	100	100	100	100	100

Mediate Outcome								
Nama Program 5 (Eselon III): Program Pengembangan Masyarakat, adat dan Sosial Budaya								
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
	Prosentase Kategori Desa/Kelurahan		%	100	100	100	100	100

Output							
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan posyandu							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah posyandu yang terintegrasi	Meningkatnya peran perempuan dalam pengembangan posyandu	Posyandu	178	312	318	324	330

Output							
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah desa yang memiliki profil desa/kelurahan		Desa	295	295	295	295	295

Output							
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Jumlah desa adat yang mendapatkan pembinaan	Terlaksananya pembinaan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya	Desa	16	16	16	16	16

HASIL MONITORING

